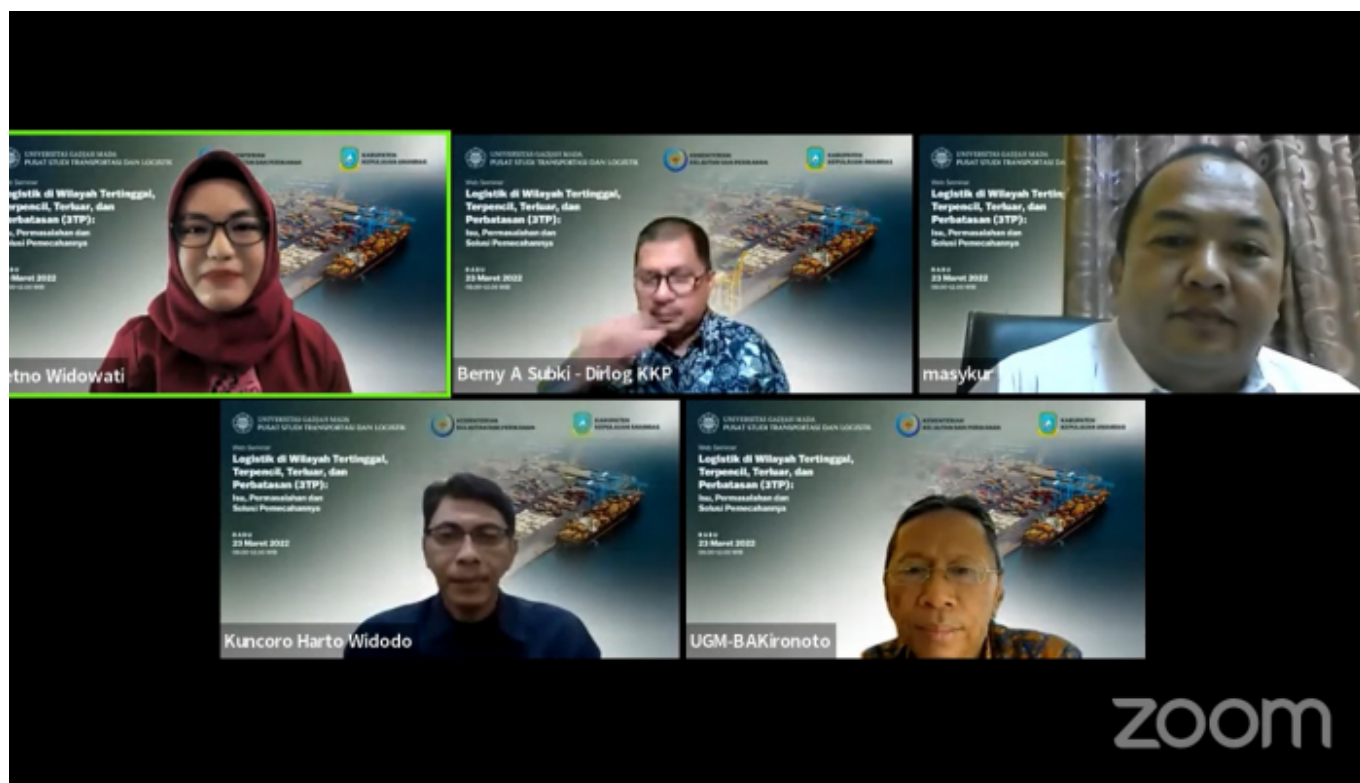


Keterbatasan Rute dan Infrastruktur Masih Jadi Persoalan Distribusi Perikanan Indonesia

Wednesday, 23 Maret 2022 WIB, Oleh: Ika



Direktur Logistik, Ditjen PDSPKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bery A. Subki, menyampaikan ada tiga tantangan utama dalam distribusi dan moda transportasi hasil perikanan di lokasi Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP).

Pertama terkait soal rute dan jadwal angkutan. Masih ada keterbatasan rute dan frekuensi jadwal angkutan tol laut.

“Rute dan frekuensi jadwal angkutan tol laut masih terbatas, terutama yang memiliki fasilitas plugging pada lokasi sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) dan sentra produksi/pengumpulan hasil perikanan lainnya di lokasi 3TP,” urainya dalam diskusi dan webinar dengan tema “Logistik di Wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP): Isu, Permasalahan dan Solusi Pemecahannya”, Rabu (23/3) yang diadakan Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) UGM.

Tantangan kedua terkait infrastruktur sarana dan prasarana. Beryny mengatakan masih ada keterbatasan sarana prasarana dalam rantai dingin. Beberapa diantaranya seperti air blast freezer, gudang penyimpanan beku, pabrik es, dan kendaraan berpendingin. Selanjutnya, keterbatasan kontainer berpendingin (reefer container) untuk komoditas perikanan dan keterbatasan sarana dan prasarana di pelabuhan.

Tantangan ketiga soal muatan. Sinergitas lokasi pelabuhan perikanan dengan pelabuhan niaga masih menjadi persoalan. Tak hanya itu kontinuitas muatan hasil perikanan tertentu dan kurangnya

sosialisasi program tol laut pada pelaku usaha perikanan.

Ia pun menyampaikan usulan rekomendasi untuk optimalisasi program tol laut di lokasi 3TP dalam mendukung distribusi hasil perikanan. Pada aspek konsolidasi muatan perlu dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan terkait program tol laut. Dibarengi dengan pembentukan kawasan hub logistik hasil perikanan untuk konsolidasi muatan berdasarkan jenis dan tujuan distribusinya.

Selain itu, fasilitasi sarana dan prasarana dengan revitalisasi sarana dan prasarana pelabuhan di lokasi SKPT. Langkah tersebut perlu diupayakan untuk mendukung penanganan dan kecepatan bongkar muatan yang menjadi pusat konsolidasi perikanan. Didukung dengan penambahan fasilitas plugging pada container di pelabuhan.

Optimalisasi program tol laut di lokasi 3TP juga perlu dengan dukungan armada pengangkut salah satunya dengan menyediakan atau menambahkan trayek dan jadwal kapal di lokasi SKPT dengan kapal yang dilengkapi plugging reefer container. Tak kalah penting dengan memperpendek rute atau jarak tempuh kapal mengingat ikan termasuk perishable product.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Kepulauan Anambas, Dr. Masykur, ST., MM., menyampaikan tinjauan logistik di wilayahnya. Ia menyampaikan ada sejumlah persoalan yang dihadapi dalam rantai logistik di Kabupaten Kepulauan Anambas. Salah satunya adalah infrastruktur pelabuhan khusus bongkar muat barang dan gudang yang belum memadai. Selain itu, terbatasnya jumlah logistik yang diangkut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Disparitas harga yang masih cukup tinggi sehingga masih sulit untuk mengikuti kebijakan HET yang ditetapkan pemerintah,” tambahnya.

Persoalan lain yang masih dihadapi yaitu pemukiman masyarakat yang tersebar di beberapa kepulauan. Ditambah dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak.


“Melalui forum ini diharapkan bisa didapatkan solusi untuk menyelesaikan persoalan di Anambas dan kabupaten wilayah kepulauan lainnya di Indonesia,” harapnya.

Tim Ahli Pustral UGM, Dr. Kuncoro Harto Widodo, menyoroti belum seimbangnya antara permintaan dan penawaran barang yang masih menjadi salah satu isu logistik nasional. Selain itu, perdagangan barang wilayah Barat-Timur Indonesia dan antar daerah yang sudah berkembang dengan daerah 3TP yang belum seimbang.

Kuncoro mengatakan isu lainnya adalah belum optimalnya kinerja infrastruktur pendukung aktivitas logistik (konektivitas logistik). Lalu, kolaborasi-koordinasi antar pelaku logistik yang belum berjalan secara efektif.

“Hal itu berujung pada sistem logistik yang tidak efisien dan efektif,” katanya.

Dalam kesempatan itu Kuncoro turut menyampaikan strategi dan program pengembangan sistem logistik daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada aspek komoditas utama strategi yang dirancang dengan menjamin ketersediaan komoditas pokok dan kelancaran distribusi ke seluruh wilayah dan menciptakan nilai tambah bagi komoditi unggulan lokal. Adapun program pengembangan yang dapat dilakukan antara lain peningkatan produksi komoditi pangan lokal, perluasan jaringan distribusi penyangga, memperkecil perbedaan harga komoditi di tingkat lokal, dan pengembangan jejaring usaha dalam pengelolaan komoditi unggulan lokal.



Lalu, pada aspek infrastruktur transportasi logistik, strategi yang dirancang yakni dengan meningkatkan aksesibilitas wilayah dan keselamatan jalan. Selain itu, juga meningkatkan peran tol laut. Sementara itu, program pengembangan yang bisa dilaksanakan dengan peningkatan kondisi laik jalan berkeselamatan, peningkatan simpul konektivitas laut di seluruh wilayah kepulauan, peningkatan kapasitas bandara, penataan manajemen pelabuhan, serta peningkatan akses ke pusat-pusat pengumpul maupun pusat distribusi yang disinggahi kapal tol laut.

Penulis: Ika

Berita Terkait

- [Peringati Usia Setengah Abad, Jurusan Perikanan ingin Jadi Fakultas](#)
- [Potensi Sumber Daya Kelautan Belum Berikan Kesejahteraan](#)
- [DIY Masih Alami Defisit Produksi Perikanan](#)
- [Raih Doktor Usai Teliti Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat di Gorontalo Utara](#)
- [Ketimpangan Antar Wilayah Masih Jadi Tantangan Pembangunan Nasional](#)